

### **BAB III**

#### **DAMPAK KONFLIK ROHINGYA TERHADAP POLITIK REGIONAL ASEAN**

Seperti yang telah penulis sebutkan pada sub bab sebelumnya, pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan salah satu konflik etnis yang memberikan dampak laten tidak hanya terhadap negara Myanmar, namun juga pada negara-negara di kawasan ASEAN. Dampak yang paling umum dijumpai dari setiap fenomena konflik yang cukup besar adalah dampak migrasi korban konflik ke daerah yang lebih aman atau dapat disebut fenomena pengungsi. Para pengungsi dari etnis Rohingya ini berusaha untuk tetap bertahan dengan cara melakukan migrasi besar besaran demi keberlangsungan hidup mereka.

Realitas pengungsi Rohingya yang tersebar tidak hanya di beberapa wilayah negara Myanmar, namun juga ke negara lain di ASEAN. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dampak terhadap politik regional kawasan ASEAN. Pada bab III penelitian ini, penulis akan membahas seputar dinamika pengungsi Rohingya serta respon negara di ASEAN terhadap krisis pengungsi Rohingya yang pada akhirnya tidak hanya menjadi isu domestik Myanmar, melainkan isu politik ASEAN.

### 3.1 Krisis Pengungsi Rohingya di Kawasan ASEAN

Dinamika Konflik Rohingya yang terjadi pada periode 2012 telah menyebabkan ribuan orang harus meninggalkan kawasan Rakhine Myanmar. Sebagian korban ada yang memilih menetap di kamp pengungsian di sekitar Rakhine, dan tak sedikit juga yang memilih untuk meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan di negara-negara Terdekat.

Berdasarkan data PBB pada tahun 2012, terdapat sekitar 800 ribu etnis Rohingya di Myanmar, dan sekitar 10 persennya telah mengungsi pada awal konflik di bulan juni hingga Oktober 2012. Ribuan pengungsi Rohingya telah ditampung di beberapa kamp pengungsi di sekitar bibir pantai ibukota Sittwe. Sekitar 6 ribu orang lainnya terdampar di perahu atau pulau di sepanjang pantai barat Myanmar dan masih mencari akses yang aman ke tempat di mana mereka bisa menerima bantuan.<sup>48</sup> Mereka para pengungsi yang masih mencari akses perlindungan pada akhirnya juga terdampar di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia.

Pada tahun 2012 hingga 2014 tercatat sekitar 94 ribu pengungsi meninggalkan Rakhine Myanmar. Mereka lebih memilih untuk mengungsi menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Bangladesh, India, Malaysia dan sebagian lagi ke Indonesia dan Thailand.<sup>49</sup> Pada tahun 2016 setelah beberapa kali

---

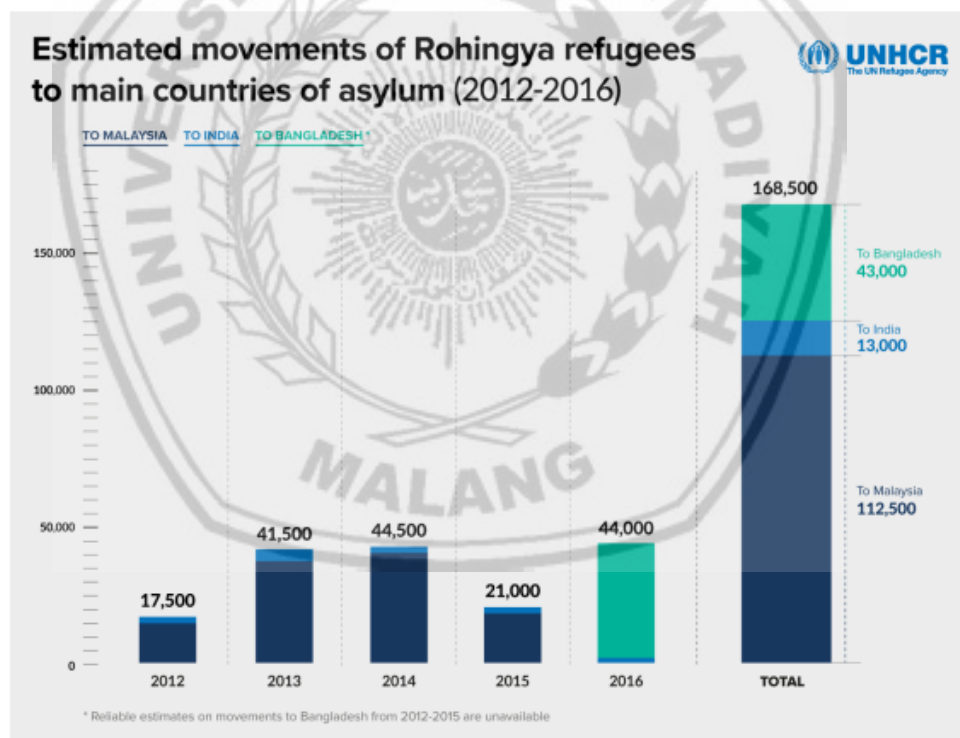
<sup>48</sup> Dalam DW, *PBB: Kamp Pengungsi Rohingya Kritis*, diakses dalam: <http://www.dw.com/id/pbb-kamp-pengungsi-rohingya-kritis/a-16343624>, 12 Januari 2018, pukul 18.00 WIB.

<sup>49</sup> Kimberly Ramos Gamez, *Examining The Asean Intergovernmental Commission On Human Rights (AICHR): The Case Study Of The Rohingya Crisis*, Thilburgh University Publisher, 2017, h. 30

periode konflik terjadi kembali jumlah pengungsi yang memilih untuk keluar dari Myanmar meningkat hingga hampir mencapai dua kali lipat peningkatan dibanding tahun 2014. Pada tahun 2016 berdasarkan jumlah yang dirilis PBB dari sub organisasinya UNHCR, tercatat lebih dari 168 ribu pengungsi. Akumulasi ini hanya didasarkan pada jumlah pengungsi yang terdata di Bangladesh, Malaysia dan India, belum termasuk di negara-negara ASEAN lainnya.<sup>50</sup>

**Diagram 3.1 Data Pengungsi Rohingya Yang Mengungsi Ke Luar Myanmar**

2012-2016<sup>51</sup>



<sup>50</sup> UNHCR, *Mixed Movement in South East Asia*, UNHCR 2016, h. 7-8

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 8

Berdasarkan Diagram 3.1, dapat dilihat bahwa pergerakan pengungsi Rohingya pada tahun 2012 hingga tahun 2016 sebagian besar bergerak menuju India, Bangladesh dan Malaysia. Dari tahun 2012 hingga 2015 mayoritas para pengungsi lebih memilih untuk bermigrasi ke Malaysia dan ke India (data Malaysia ditunjukkan pada diagram berwarna biru tua, dan India diagram berwarna biru muda). Pada tahun 2016, sebagian besar pengungsi Rohingya lebih memilih untuk meninggalkan Myanmar dan menuju Bangladesh, dengan demikian jumlah total pengungsi terdata oleh PBB sejak 2012 hingga 2016 mencapai jumlah kisaran 168.500 orang.

Permasalahan pengungsi Rohingya yang menyebar ke beberapa negara tetangga Myanmar bukanlah satu-satunya dampak buruk dari konflik yang terjadi di Rakhine. Dampak lain dari konflik ini adalah munculnya sindikat *human trafficking* (penjualan manusia) yang memanfaatkan kondisi para pengungsi. Kondisi psikis dan fisik para pengungsi yang tidak stabil dan membutuhkan bantuan menjadi kelemahan yang paling menarik bagi para pelaku kejahatan transnasional ini.

Para pelaku kejahatan transnasional dalam hal perdagangan manusia terhadap para pengungsi Rohingya telah menjadi fakta umum selama terjadinya konflik. Mereka umumnya menawarkan tempat berlindung di beberapa negara tetangga Myanmar dengan menjanjikan pekerjaan layak dalam bidang informal dan menjanjikan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya para pengungsi hanya dijual sebagai budak ilegal dan buruh kasar dengan jaminan gaji yang dipotong secara tidak manusiawi bahkan tanpa digaji setiap bulannya. Tidak

dijelaskan berapa data konkret jumlah korban perdagangan manusia dari para pengungsi Rohingya ini, namun berdasarkan data dari tulisan Kimberly Ramos Gamez jumlahnya mencapai ribuan orang.<sup>52</sup>

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry memprotes beberapa Myanmar dan beberapa negara di ASEAN lain yang kurang berkontribusi dalam hal penanggulangan pengungsi dan penjualan manusia. Pada tahun 2015 status Myanmar juga diturunkan pada status terendah sebagai negara pelanggar HAM terburuk di dunia berdasarkan peringkat *Trafficking in Persons* (TIP) Departemen Luar Negeri AS. Malaysia dan Thailand juga mendapat protes dari menteri Luar Negeri Amerika Serikat karena telah melakukan pembiaran terhadap pekerja ilegal yang masuk melalui para palaku penjualan manusia.<sup>53</sup>

Di Thailand ditemukan beberapa pengungsi yang disekap dan disalurkan sebagai pekerja ilegal di negara Thailand. *Trafficking in Persons* (TIP) Departemen Luar Negeri AS, otoritas Thailand seolah-olah melakukan pembiaran terhadap isu ini. Dari beberapa data yang ditemukan, para pengungsi disekap di tempat yang tidak layak dan dipekerjakan oleh beberapa agen tenaga kerja dengan keadaan para pengungsi yang tanpa status yang jelas.<sup>54</sup>

Laporan *Trafficking in Persons* (TIP) akan berdampak pada hubungan Amerika Serikat dan negara-negara yang dilaporkan, Terutama Myanmar. Pada

---

<sup>52</sup> Kimberly Ramos Gamez, *Op.Cit.*, h. 31

<sup>53</sup> Amy Smith, *Myanmar, Thailand, Malaysia: End Human Trafficking, Protect Survivors*, Fortify Right, 1 Juli 2016, diakses dalam: <http://www.fortifyrights.org/publication-20160701.html>, 17 Februari 2018, pukul 21.00 WIB.

<sup>54</sup> *Ibid.*

tahun 2015, Myanmar, Thailand dan Malaysia masuk pada daftar negara *Watch Lists* TIP selama 12 bulan atau sepanjang tahun 2015.<sup>55</sup> Daftar *Watch Lists* TIP nantinya akan menjadi parameter pertimbangan pemerintah Amerika Serikat dan PBB pada negara terkait ketika mereka telah masuk pada daftar negara pelanggar valid.<sup>56</sup>

Berdasarkan data-data yang penulis jabarkan pada sub bab ini, dapat dilihat bahwa konflik Rohingya di Rakhine Myanmar memberikan dampak yang cukup kompleks, tidak hanya pada Myanmar saja, melainkan pada negara-negara lain seperti India, Bangladesh dan beberapa negara ASEAN lainnya. Dampak yang ditimbulkan adalah dampak masalah pengungsi yang tersebar tidak hanya di wilayah Myanmar, melainkan di negara-negara yang berdekatan dengan Myanmar. Adanya gelombang pengungsi yang begitu besar juga turut menstimulasi munculnya masalah perdagangan manusia sebagai dampak konflik ini.

### **3.2 Respon Negara Anggota ASEAN**

Dampak gelombang pengungsi yang menyebar ke beberapa negara di wilayah Asia Tenggara turut berkontribusi dalam menambah masalah politik dan kemanusiaan bagi ASEAN. Beberapa negara di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia yang merupakan negara yang juga terkena dampak dari pengungsi juga merasa terbebani oleh gelombang pengungsi Rohingya yang

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

mencapai kawasan teritori mereka. Beberapa negara di ASEAN ini kemudian juga merespon terhadap fenomena konflik Rohingya yang juga turut berimplikasi pada mereka.

Respon negara pertama yang akan penulis jelaskan adalah respon Thailand. Thailand pada dasarnya bukanlah tujuan utama para pengungsi, namun sebagian pengungsi Rohingya juga banyak yang terdampar di lepas pantai Thailand. Negara ini merespon dengan upaya *help on and push back* (Menolong dan mendorong kembali), artinya otoritas Thailand hanya menolong beberapa kapal yang terdampar di lepas pantai Thailand dengan memberikan akomodasi pangan dan obat-obatan, kemudian mendorong kapal mereka kembali ke perairan lepas di luar teritori Thailand.<sup>57</sup>

Thailand mempunyai alasan di balik kebijakannya ini. Otoritas Thailand mengemukakan bahwa negaranya tidak berhak untuk menampung pengungsi korban konflik apalagi sampai memberikan mereka suaka dan tempat berlindung. Hal tersebut dikarenakan Thailand bukanlah negara anggota *Refugee Convention* tahun 1951. Thailand beralasan karena mereka bukan bagian dari konvensi tersebut, maka pemerintah Thailand tidak dapat memberikan jaminan kelayakan hidup para pengungsi di teritori mereka.<sup>58</sup>

Meski Thailand tidak termasuk pada negara anggota *Refugee Convention* 1951, Thailand telah menandatangani dan termasuk dalam anggota *the International Covenant on Civil and Political Rights*, yang artinya Thailand juga harus pro

---

<sup>57</sup> Dalam: Kimberly Ramos Gamez, *Op.Cit.*, h. 34

<sup>58</sup> *Ibid.*

terhadap upaya-upaya pembelaan HAM dan menjadi pelindung bagi para korban pelanggaran HAM. Berlandaskan pasal 2 dan pasal 26 *the International Covenant on Civil and Political Rights*, Thailand hanya merasa berhak untuk mengupayakan bantuan dan kontribusi dalam kewenangan mereka, bukan diluar kewenangan mereka seperti menyediakan suaka bagi para pengungsi dan menampungnya di Thailand.

“To respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind...” (pasal 2 kutipan *the International Covenant on Civil and Political Rights*).<sup>59</sup>

“The law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground...” (pasal 26 kutipan *the International Covenant on Civil and Political Rights*).<sup>60</sup>

Berdasarkan pasal 2 dan pasal 26 pasal 226 kutipan *the International Covenant on Civil and Political Rights*, negara anggota diharuskan memberikan perlakuan layak terhadap korban pelanggaran HAM tanpa mendiskriminasikan mereka, dan para korbannya harus mematuhi dan mentaati peraturan di wilayah yurisdiksi negara tempat mereka berada. Karena Thailand tidak mempunyai kebijakan khusus seputar pengungsi, negara ini kemudian hanya memberikan perlakuan layak yang bersifat sementara bagi para pengungsi seperti kebijakan *help on and push back*. Dalam implementasi kebijakan *help on and push back*, Thailand

---

<sup>59</sup> United Nations High Commissioner for Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights*. Retrieved from United Nations High Commissioner for Human Rights, diakses dalam: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>, 22 Februari 2018, pukul 18.30 WIB.

<sup>60</sup> *Ibid.*



tidak hanya memberikan bantuan akomodasi pangan dan obat-obatan bagi para pengungsi yang terdampar di lepas pantai negara tersebut, melainkan juga memberikan bantuan terhadap para pengungsi yang berada di wilayah perairan Thailand dan membantyu mereka untuk mencari arah ke wilayah tujuan mereka selanjutnya.<sup>61</sup>

Berikutnya penulis akan menjelaskan respon Malaysia terhadap pengungsi Rohingya. Para pengungsi Rohingya yang mencapai Malaysia pada dasarnya datang melalui jalur perdagangan. Para pengungsi ini dianggap sebagai imigran ilegal tanpa kewarganegaraan, yang sering tinggal di daerah kumuh dan rawan menghadapi diskriminasi dan eksploitasi para anggota perdagangan manusia. Banyak kasus penemuan beberapa pengungsi Rohingya yang dipekerjakan di beberapa wilayah di Malaysia sebagai buruh kasar informal, dengan gaji minim bahkan tanpa gaji sama sekali.<sup>62</sup>

Karena begitu banyaknya kasus imigran ilegal dari para pengungsi Rohingya pemerintah Malaysia mengupayakan untuk mengusir kembali kapal pengungsi di wilayah perairan mereka, dan hanya memberikan bantuan jika awak kapalnya dalam keadaan keritis seperti kelaparan dan sakit. Bantuan ini diberikan hanya di wilayah perairan Malaysia. Kebijakan lain yang diimplementasikan oleh Malaysia adalah membentuk tim khusus guna menangkap para sindikan perdagangan manusia yang mengeksploitasi para pengungsi Rohingya di Malaysia.

---

<sup>61</sup> Thomas Fuller, Patrick J. Lyons, *How Myanmar and Its Neighbors Are Responding to the Rohingya Crisis*, Newyork Times, 14 Mei 2015, diakses dalam: <https://www.nytimes.com/interactive/2015/05/13/world/asia/15rohingya-explainer.html>, 22 Februari 2018, pukul 18.30 WIB.

<sup>62</sup> *Ibid.*

Pembentukan tim ini membuahkan hasil, pada tahun 2015 pemerintah Malaysia berhasil menangkap 7 sindikat perdagangan manusia dan berhasil mengevakuasi ratusan pengungsi Rohingya yang mereka sekap di kamp yang mereka miliki.<sup>63</sup>

Kebijakan yang diambil oleh Malaysia didasarkan pada landasan yang sama dengan Thailand. Negara ini tidak menyambut para pengungsi bukan karena ingin mengabaikan mereka, namun karena Malaysia bukan merupakan negara anggota *Refugee Convention* 1951. Pada Mei 2015, Malaysia akhirnya berbaik hati untuk membuka kuota pengungsi sebanyak 7000 orang bagi para pengungsi Rohingya untuk sementara tinggal di Malaysia hingga waktu yang tidak ditentukan atau hingga keadaan konflik mulai reda dan situasi Rakhine mulai stabil.<sup>64</sup>

Berikutnya adalah respon Indonesia terhadap para pengungsi Rohingya. Layaknya Thailand dan Malaysia, Indonesia juga bukan merupakan negara anggota *Refugee Convention* 1951, namun karena respon penduduk yang begitu masif terhadap isu konflik Rohingya, pemerintah berusaha untuk menampung para pengungsi yang terdampar di sepanjang pulau Sumatera. Indonesia telah mulai menampung para pengungsi Rohingya sejak periode konflik 2012. Pada saat itu banyak sekali para pengungsi yang terdampar di sepanjang pulau Sumatera.

Pemerintah Indonesia memfasilitasi mereka dengan kamp pengungsian yang layak, pangan dan sandang dan obat-obatan. Pihak imigrasi Indonesia juga memberikan surat izin sementara pada para pengungsi ini sejak 2012. Mereka juga dibekali dengan berbagai keterampilan hard skill dan diberdayakan dalam berbagai

---

<sup>63</sup> Amy Smith, *Op.Cit.*

<sup>64</sup> Thomas Fuller, Patrick J. Lyons, *Op.Cit.*

bidang pendidikan lainnya oleh para relawan. Para pengungsi ini merasa beruntung terdampar di Indonesia, karena mereka diperlakukan dengan baik, berbeda dengan yang terjadi di wilayah lainnya. Meski mereka merasa nyaman, para pengungsi ini masih mempunyai niatan untuk terus berlayar dan mencari suaka ke wilayah Australia, karena mereka mengetahui, banyak etnis Rohingya yang telah mendapatkan suaka di Australia dan dapat hidup layak di sana.

Pada dasarnya pemerintah Indonesia tidak begitu dirugikan dengan memberikan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya, mengingat pengungsi Rohingya di Indonesia tidak sebanyak pengungsi di Malaysia, pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia dari 2012 hingga 2015 hanya berjumlah ratusan orang. Meski demikian pemerintah Indonesia akan terus berkontribusi penuh dalam meanangani para pengungsi Rohingya.

Komitmen perlindungan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Indonesia diperkuat pasca tanggal 20 Mei 2015. Indonesia juga kemudian mengikuti jejak Malaysia dalam membuka kuota pengungsi Rohingya. Kuota tersebut dibuka untuk 7000 orang. Para pengungsi yang termasuk dalam kuota tersebut akan tinggal sementara di Indonesia dan akan mendapatkan perlakuan layaknya warga negara. Waktu tinggal mereka tidak ditentukan, artinya hanya terbatas pada keadaan negara bagian Rakhine. Ketika konflik di Rakhine mulai tidak bergejolak lagi dan keadaan kondusif kembali, mereka akan difasilitasi untuk kembali lagi ke Myanmar.

**Tabel 3.1 Kebijakan Negara ASEAN terhadap Pengungsi  
Rohingya 2012-2015**

Negara	Kebijakan
--------	-----------

Thailand	Kebijakan <i>Help On and Push Back</i>
Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan yang hampir serupa dengan <i>Help On and Push Back</i> pada 2012</li> <li>2. Kebijakan membentuk tim anti kejahatan perdagangan Manusia.</li> <li>3. Kebijakan 7000 kuota pengungsi (per Mei 2015)</li> </ol>
Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan menampung pengungsi sementara (2012).</li> <li>2. Memberdayakan Pengungsi.</li> <li>3. Kebijakan 7000 kuota pengungsi (per Mei 2015)</li> </ol>

Berdasarkan data di atas yang telah penulis kemukakan pada sub bab ini, dapat dilihat respon negara anggota ASEAN terhadap para pengungsi Rohingya. Respon ini hanya diimplementasikan melalui kebijakan tiga negara ASEAN yaitu Thailand, Malaysia dan Indonesia, mengingat tiga negara ini mempunyai jalur maritim yang begitu dekat dengan Myanmar dan banyaknya para pengungsi yang terdampar di tiga negara ini. Kebijakan yang diambil oleh tiga negara ini berbeda-beda. Kebijakan ini mereka sesuaikan dengan realita hukum yurisdiksi mereka .